

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan Penganggaran Dana Untuk Masyarakat Nelayan. Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Wilayah lautan atau perairan Sumatera Barat memiliki peranan penting dalam kehidupan, salah satunya sebagai lahan mata pencaharian masyarakat disekitar pesisir, tidak kurang dari sepertiga wilayah/daerah yang berada di pesisir barat pulau Sumatera dikategorikan sebagai daerah/wilayah yang memiliki penduduk yang kurang mampu, jika dibandingkan penduduk petani yang ada pada dataran tinggi. Kondisi kemiskinan dan keterbatasan sosial yang dialami oleh masyarakat nelayan diakibatkan oleh faktor yang kompleks, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), modal dan cuaca/iklim yg tidak menentu yang berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Kualitas sumber daya manusia terutama masyarakat nelayan pada saat ini dapat dikatakan telah meningkat. Menurut survei yang dilakukan kepada para nelayan yang berada di Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat, dapat diketahui bahwa pendidikan yang ditempuh oleh nelayan yang rata-rata berumur 20-40 tahun sampai pada tingkat SMA, sedangkan 50-60 tahun sampai pada tingkat SMP dan SD hanya beberapa orang saja, hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran masyarakat nelayan

terhadap pendidikan sudah mulai meningkat. Walaupun kesadaran nelayan terhadap pendidikan sudah mulai meningkat tetapi yang menjadi hambatan adalah sulitnya mencari pekerjaan sehingga para nelayan sulit keluar dari pekerjaannya sebagai nelayan.

2. Bantuan dibutuhkan oleh nelayan dikarenakan sulitnya perekonomian dan keterbatasan modal, serta terbatasnya peluang dan kesempatan nelayan untuk melakukan diversifikasi pekerjaan, terutama diluar kegiatan pencarian ikan di laut. Bantuan yang dibutuhkan nelayan itu berupa sarana penangkapan atau alat tangkap ikan yang nantinya dapat digunakan oleh nelayan dalam mempermudah aktifitasnya. Diantaranya jaring ikan, kapal, fish box, gillnet, trammel net, rumpon laut, mesin/motor tempel dll. Dinas kelautan dan Perikanan Sumatera barat Juga aktif dalam membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan mereka dengan memberikan bantuan berupa sarana bantu penangkapan atau alat tangkap ikan, sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan perekonomian nelayan.
3. Proses penganggaran dana memiliki beberapa syarat dan ketentuan, ada beberapa aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dipatuhi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan oleh Permendagri. Nelayan yang mengajukan proposal permohonan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan peninjauan untuk diketahui bahwa memang ada kelompok

nelayan yang akan mengajukan permohonan bantuan tersebut, maka barulah permohonan kelompok nelayan tersebut bisa di proses.

4. Dalam proses penganggaran dana bantuan untuk masyarakat nelayan di Provinsi Sumatera Barat tergolong tidak ditemukan adanya kendala, karena proses yang jelas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, maka nelayan mudah dalam melakukan proses pengajuan proposal bantuan.

Dari pembahasan tentang Proses Penganggaran Dana Bantuan Untuk Masyarakat Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada kelompok nelayan tradisional dapat membantu dan mempermudah nelayan melakukan aktifitasnya dalam proses penangkapan ikan dan hal ini juga berdampak pada perekonomian para nelayan yang meningkat, karena sarana dan alat bantu yang diberikan sangat membantu jalannya aktifitas nelayan dalam menangkap ikan dan menjalankan aktifitasnya.

5.2 Saran

Setelah menjelaskan bagaimana Proses Penganggaran Dana Bantuan Untuk Masyarakat Nelayan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

Dalam pemberian bantuan bagi masyarakat nelayan diharapkan adanya sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk masyarakat nelayan yang akan dibantu, agar masyarakat nelayan dapat mengetahui

prosedur pemberian bantuan yang akan diterimanya, sehingga bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, agar kedepannya tidak ditemui temuan yang tidak di inginkan saat monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, seperti tidak terdeteksinya keberadaan sarana bantu dan alat tangkap ikan yang diberikan pada nelayan.

